

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangat penting bagi perkembangan sumber daya manusia, dengan adanya dunia pendidikan membebaskan manusia hidup dari keterbelakangan serta kebodohan. Pendidikan diyakini dapat mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik atau produktif. Pendidikan juga dapat memperluas akses dan mobilitas sosial masyarakat baik secara horizontal maupun vertikal. Karena dengan pendidikan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kehidupan manusia dimasa sekarang bahkan dimasa yang akan datang. Pendidikan dapat menjadikan manusia menjadi lebih cerdas, kehidupan menjadi aman, dan terbuka, bahkan lebih kritis dalam berdemokrasi. Negara maju ditentukan dengan peningkatan mutu sumber daya manusia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pendidikan

diperuntukan bagi seluruh peserta didik. Pada tingkat SD, SLTP, dan SLTA serta perguruan tinggi.

Kebijakan ini telah ditindaklanjuti dengan kebijakan penjelas dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar dan juga Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam rangka percepatan pencapaian program wajib belajar pemerintah telah menjabarkan kebijakan publik tersebut dalam berbagai program, salah satu di antaranya adalah program pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan dasar bagi seluruh warga negara khususnya bagi warga negara yang mengalami hambatan karena faktor geografis maupun karena faktor ekonomi. Salah satu pemerintah dalam rangka pemerataan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui pengalokasian dana yang memadai adalah Program BOS yang dimulai pada bulan Juli tahun 2005. Meskipun program BOS disetiap tahunnya mengalami perubahan mengingat perkembangan IT semakin luas. Selain itu, peningkatan biaya BOS yang cukup signifikan dijadikan langkah strategis pemerintah dalam menyelenggarakan program pendidikan gratis untuk pendidikan dasar yang bermutu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 4). Secara khusus program ini bertujuan untuk menggratiskan seluruh siswa miskin pada tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik negeri maupun swasta; menggratiskan seluruh siswa SD dan SMP negeri dari

biaya operasional sekolah. Kebijakan sekolah gratis ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan, selain kenaikan unit cost dana BOS yang diberikan kepada sekolah juga adanya perbaikan tingkat kesejahteraan guru melalui program sertifikasi, serta adanya kewajiban pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk memenuhi kekurangan biaya operasional apabila dana BOS belum mencukupi sebagaimana tertuang dalam buku panduan dana BOS.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, program BOS tidak selalu berjalan dengan mulus sebagaimana yang diharapkan. Beberapa persoalan muncul, misalnya terkait dengan jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah yang didasarkan pada unit cost tiap siswa dikalikan dengan jumlah murid. Bagi sekolah yang memiliki jumlah murid besar, biaya operasional bisa tercukupi karena sekolah tersebut menerima dana dalam jumlah yang cukup besar. Namun, bagi sekolah yang jumlah muridnya kecil, dana yang diterimanya akan kecil dan tidak cukup mengingat ada sejumlah pos yang jumlahnya sama dan harus dikeluarkan tanpa membedakan apakah sekolah memiliki jumlah siswa besar atau kecil.

Adanya program dana BOS, menuntut kemampuan sekolah untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah dalam pengertian cara kepala sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Aspek mendasar

dari manajemen adalah perencanaan, dalam hal pembiayaan yang disebut penganggaran sekolah. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan, dalam hal pembiayaan yang disebut penganggaran.

Salah satu Sekolah Dasar (SD) yang menerima dan mengelola dana BOS adalah SD Negeri Toliba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una. Berdasarkan data SD Negeri Toliba jumlah guru dan pegawai sebanyak 14 orang dan jumlah murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 berjumlah 115 siswa sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan menurut status kepegawaian dan jenis kelamin

No	Uraian	Status		Jenis Kelamin	
		PNS	Non PNS	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Sekolah	1			1
2	Guru Kelas	6		2	4
3	Guru PAI	1			1
4	Guru Penjasorkes	1		1	
5	Tenaga Perpustakaan		1		1
6	Penjaga Sekolah	1		1	
7	Tata Usaha		1		1
8	Guru Subsidi		2		2
	Jumlah	10	4	4	10

Sumber : SDN Toliba 2019

Tabel 1.1
Data Peserta didik

Kelas	Jumlah Siswa		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	8	8	16
2	10	7	17
3	6	10	16
4	16	7	23
5	13	10	23
6	14	6	20
Jumlah	67	48	115

Sumber : SDN Toliba 2019

Berdasarkan tabel diatas setiap sekolah berbeda dana yang diberikan berdasarkan tingkatan sekolah dan jumlah siswa. Dengan demikian besaran dana BOS yang diterima sebagian dananya dapat dialokasikan untuk biaya belanja pegawai, bagi guru Tenaga Honor dan Tenaga Kependidikan serta biaya kegiatan kepramukaan dan kegiatan les (Belanja jasa Guru). Besar belanja pegawai yang dikeluarkan tergantung dari masing-masing otonomi sekolah berdasarkan Dana BOS yang diterima makin banyak jumlah siswa maka makin besar dana BOS yang akan dikelola. Namun ada permasalahan yang ditemui bagi sebagian sekolah yaitu kurang transparannya penggunaan dana BOS tersebut. keberadaan dana BOS di SD Negeri Toliba sendiri harus berdampak positif terhadap kemajuan sekolah tersebut dilihat dari perkembangan sekolahnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam suatu karya ilmiah dengan judul: **Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Toliba Kabupaten Tojo Una-una.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut : Bagaimana Pengelolaan Dana BOS Pada SD Negeri Toliba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS Pada SD Negeri Toliba Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

- 2 Bagi Sekolah penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengetahui pengelolaan dana BOS untuk perkembangan Sekolah.
- 3 Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan mengkaji masalah yang berkaitan dengan judul skripsi ini lebih lanjut.
- 4 Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso.

